



Dinamika Politik Dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin

Rahmawati¹, Ryllian Chandra Eka Viana², Ibrahim Mifthafariz³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rahmawatimza16@gmail.com, ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id, ibrahimmiftafarizmirza_uin@radenfatah.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to understand the political dynamics related to clean water provision in Banyuasin II District, Banyuasin Regency. The main focus of this study is the political dynamics between various local parties in the planning and implementation of the clean water provision program, as well as the challenges faced by the village government in implementing the program. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was obtained through in-depth interviews, documentation, and observation of several informants consisting of village heads, sub-district heads, and local residents. The analysis in this study uses the access theory proposed by Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso (2003), to understand how power relations influence access to water resources. The results show that the political dynamics in clean water provision in Banyuasin II District are influenced by power relations among local government actors. Not all villages in this area have a clean water provision program. The program is only found in Sungsang I Village and Sungsang III Village. In Sungsang I Village, there is a clean water distillation program built by the village government to meet community needs, which reflects rights-based access in the provision of public services. However, the current program is no longer operational due to a breakdown in the distillation machine. Meanwhile, Sungsang III Village has a clean water supply program through drilled wells designated for residents, but in practice, access to the water source is more often reserved for relatives of the village head. This situation indicates the existence of illegal access practices and structural mechanisms in the dynamics of water resource access at the local level.

Keywords: Political Dynamics, Clean Water Access, Village Government.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika politik terkait penyediaan air bersih di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Fokus utama penelitian ini adalah dinamika politik antara berbagai pihak lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program penyediaan air bersih, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menjalankan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap beberapa informan yang terdiri dari kepala desa, camat, dan masyarakat setempat. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori akses yang dikemukakan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi akses terhadap sumber daya air. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dinamika politik dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Banyuasin II dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan di antara para aktor pemerintah lokal. Tidak semua desa di wilayah ini memiliki program penyediaan air bersih. Program tersebut hanya terdapat di Desa Sungsang I dan Desa Sungsang III. Di Desa Sungsang I, ada program penyulingan air bersih yang dibangun oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mencerminkan akses berbasis hak dalam penyediaan layanan publik. Namun, program saat ini tidak lagi berfungsi karena mesin penyulingan mengalami kerusakan. Sementara itu, Desa Sungsang III memiliki program penyediaan air bersih melalui sumur bor yang diperuntukkan warga, tetapi dalam praktiknya, akses terhadap sumber air lebih sering digunakan oleh kerabat kepala desa. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik akses ilegal dan mekanisme struktural dalam dinamika akses sumber daya air di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Dinamika Politik, Akses Air Bersih, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan tidak bisa digantikan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Tanpa adanya air, manusia tidak bisa bertahan hidup (Djana, 2023). Ketersediaan air bersih yang aman dan memenuhi kriteria menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kesejahteraan dan perkembangan manusia. Walaupun Indonesia dikenal memiliki banyak sumber daya air, masih terdapat ketidakmerataan dalam distribusi dan penggunaannya. Akses yang tidak merata terhadap air bersih tetap menjadi tantangan utama, khususnya di daerah pedesaan yang sering kekurangan infrastruktur dan layanan dasar. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses terhadap air minum yang sesuai di daerah pedesaan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan, baik dalam aspek kualitas maupun keberlanjutannya (BPS, 2024).

Di daerah pesisir seperti Kecamatan Banyuasin II, tantangan dalam menyediakan air bersih menjadi lebih rumit. Karakteristik geografis yang melibatkan pasang surut serta tingginya kadar garam membuat air tanah sulit digunakan sebagai sumber air minum. Akibatnya, masyarakat di Desa Sungsang mengandalkan air sungai dan hujan untuk memenuhi keperluan harian mereka. Ketika musim kemarau tiba, beberapa warga terpaksa membeli air dengan biaya yang cukup tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah air bersih tidak hanya muncul dari keterbatasan sumber daya alam, tetapi juga berhubungan dengan sistem pengelolaan dan kapasitas lembaga lokal.

Masalah penyediaan air bersih di tingkat desa sangat terkait dengan pengelolaan dan dinamika politik setempat. Proses perencanaan dan pelaksanaan program air bersih melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan masyarakat. Namun, perbedaan kepentingan, batasan kekuasaan, dan rendahnya koordinasi antar tingkat pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan program air bersih yang berkelanjutan. Dengan demikian, akses terhadap air bersih bukan hanya soal teknis, melainkan juga berkaitan dengan relasi kekuasaan dan dinamika politik.

Dengan melihat situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik lokal mempengaruhi penyediaan air bersih di Desa

Sungsang. Penelitian ini berfokus pada hubungan antar aktor lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program air bersih di tingkat desa. Dengan menerapkan teori akses yang diperkenalkan oleh Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), yang menekankan bahwa akses terhadap sumber daya air tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan atau hak formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya tersebut melalui hubungan kekuasaan, sosial, dan politik (Ribot & Peluso, 2003). Pendekatan ini diterapkan untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan antar aktor lokal memengaruhi pola akses masyarakat terhadap air bersih.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika politik terkait penyediaan air bersih di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II. Menurut Sugiyono, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi yang ada di lapangan, berbeda dengan pendekatan eksperimental, dimana peneliti berperan sebagai instrument utama, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi yang mencakup analisis data secara induktif. Temuan dari penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman makna daripada pembuatan generalisasi (Safarudin et al. 2023). Lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah Desa Sungsang I dan Desa Sungsang III, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, yang dipilih karena memiliki dinamika program penyediaan air bersih yang representatif untuk dianalisis. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program air bersih, yang meliputi, kepala desa, pihak kecamatan, serta masyarakat setempat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan konsisten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa elemen, seperti desain riset, populasi dan sampel (tujuan penelitian), cara pengumpulan data, serta cara analisis data. Penelitian kualitatif ini melibatkan studi kasus, fenomenologi, dan bentuk penelitian lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dan lain-lain). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu penyediaan air bersih di Desa Sungsang sangat terkait dengan dinamika politik di daerah tersebut yang melibatkan beberapa pihak, terutama pemerintah desa, pemerintahan kecamatan, dan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah desa memiliki tanggung jawab resmi

untuk merencanakan dan melaksanakan program air bersih, kewenangan ini belum berhasil menciptakan layanan air bersih yang berkelanjutan. Temuan yang diungkapkan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari hasil studi di dua desa yang memiliki karakteristik geografis dan permasalahan air bersih yang serupa. Berbagai program yang pernah dilaksanakan menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan, sehingga tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih bukan hanya sekadar masalah teknis ketersediaan sumber daya, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kemampuan lembaga di tingkat lokal.

Dinamika Politik Antaraktor Lokal dalam Penyediaan Air Bersih

Dinamika adalah hubungan antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya secara keseluruhan (Kadarisma, 2012). Sedangkan dinamika politik merupakan gerakan mempromosikan penyesuaian perilaku yang disengaja pada akhirnya akan memberi karakter dan perubahan pada pemerintah. Kekuatan individu atau kelompok yang berinteraksi dalam organisasi atau institusi politik itu disediakan oleh dinamika politik (Puspa, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi politik di antara aktor lokal memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberlangsungan program penyediaan air bersih di Desa Sungsang. Pemerintah Desa merupakan badan pemerintahan di tingkat lokal memainkan peranan yang signifikan dalam kemajuan dan pemberdayaan masyarakat (Sandika dkk, 2023).

Dalam konteks penyediaan air bersih, pemerintah desa berperan sebagai aktor utama karena memiliki otoritas resmi dalam membuat keputusan serta melaksanakan program. Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh anggaran dan lembaga yang memadai, sehingga rencana program air bersih tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain peran pemerintah desa, dukungan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan juga sangat penting. Berbagai jenis perubahan sosial yang diistilahkan sebagai pembangunan diperkenalkan dan diterapkan oleh pemerintah desa. Untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik, pemerintah desa harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya (Alamsyah & Angela, 2023).

Hasil wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa pemerintah desa pernah mendirikan sarana untuk menyediakan air bersih seperti sistem penyulingan dan sumur bor, tetapi sarana tersebut tidak bertahan lama karena mengalami kerusakan dan kurangnya dana untuk pemeliharaan. Dalam hal ini, partisipasi pemerintah kecamatan dalam program air bersih hanya terbatas pada fungsi administratif dan pengawasan. Wawancara dengan pihak kecamatan mengungkapkan bahwa pelaksanaan program air bersih sebagian besar dikelola oleh pemerintah desa karena pengaturan anggaran ada di tingkat desa. Dalam perspektif teori akses dari Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso, situasi ini menunjukkan bahwa akses berbasis hak yang dimiliki pemerintah desa tidak selalu berujung pada kemampuan yang efektif dalam mengelola dan menyediakan sumber daya air. Hak formal belum dibarengi dengan kapasitas struktural yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil temuan ini menunjukkan bahwa dinamika politik antara aktor lokal di Desa Sungsang masih berjalan tersendiri dan belum saling terhubung. Keputusan politik mengenai penyediaan air bersih cenderung dikelola secara terpisah, tanpa adanya koordinasi yang baik antara berbagai tingkatan pemerintahan, yang menyebabkan program air bersih yang ada tidak berjalan dengan baik.

Kendala Pemerintah Desa dalam Merealisasikan Program Penyediaan Air Bersih

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam menyediakan air bersih, seperti keterbatasan dana, kerusakan infrastruktur, dan kurangnya dukungan teknis dari pemerintah daerah. Anggaran sangat penting dalam proses perencanaan suatu organisasi dan harus disusun dengan baik agar semua rencana bisa dilaksanakan sesuai dengan alokasi yang ada serta dilaporkan untuk tanggung jawab organisasi (Umarella, 2019). Hasil wawancara dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa keterbatasan dana desa menjadi salah satu kendala utama dalam melakukan pemeliharaan fasilitas air bersih yang telah dibangun.

Keterbatasan ini berdampak pada sistem penyediaan air bersih yang belum berjalan secara berkelanjutan. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa beberapa warga masih menggunakan air hujan untuk keperluan minum dan memasak, sementara air yang berasal dari sungai dipakai untuk mandi dan mencuci. Pendekatan ini muncul sebagai respons warga terhadap kondisi layanan air bersih yang masih belum memadai. Di samping itu, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam mengenali isu dan potensi dalam komunitas, memilih serta mengambil keputusan mengenai berbagai solusi untuk mengatasi masalah, serta mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dan menilai masalah yang timbul (Siregar, 2020).

Selain menghadapi hambatan struktural, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program juga masih sangat terbatas. Pengambilan keputusan sering kali bersifat top-down, sehingga masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima kebijakan daripada sebagai pihak yang aktif terlibat dalam pengelolaan air bersih. Dalam konteks teori akses, keadaan ini mencerminkan dominasi mekanisme struktural dan relasional dalam menentukan akses masyarakat terhadap air.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah air bersih di Desa Sungsang merupakan hasil dari interaksi antara keterbatasan kapasitas lembaga dan dinamika politik lokal yang belum terkoordinasi dengan baik. Kegagalan dalam menciptakan tata kelola yang terintegrasi mengakibatkan program air bersih tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tetap bergantung pada sumber daya nonformal yang kualitas dan keberlanjutannya tidak terjamin.

Implikasi Dinamika Politik dan Kendala Program terhadap Akses Air Bersih Masyarakat

Air adalah suatu sumber daya yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia tanpa air, tidak mungkin ada kehidupan di bumi ini. Dengan mempertimbangkan seberapa pentingnya akses terhadap air bersih, adalah hal yang wajar maka jika sektor air menjadi fokus utama dalam penanganan, karena langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum (Mardeansyah & Ma'arief, 2022). Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di Desa Sungsang masih kurang baik dari aspek kualitas ataupun keberlanjutan. Dalam praktiknya, warga masih bergantung pada air hujan untuk kebutuhan konsumsi serta air dari sungai untuk aktivitas sehari-hari. Ketergantungan pada sumber daya alam ini menunjukkan bahwa layanan resmi belum mampu menjamin akses air bersih yang konsisten.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pada musim kemarau, beberapa warga harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang pada akhirnya menambah beban ekonomi masyarakat. Merujuk pada teori akses yang dikemukakan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), keadaan ini menunjukkan bahwa keterediaan terhadap air tidak hanya ditentukan oleh hak-hak formal atau keberada program pemerintah. Aspek-aspek struktural dan hubungan antarindividual, termasuk kemampuan lembaga dan struktur kekuasaan di antara para pihak, lebih menentukan keberhasilan dalam distribusi sumber daya tersebut. Dengan demikian, masalah air bersih di Desa Sungsang lebih dari sekadar persoalan teknis infrastruktur, namun juga mencerminkan tantangan dalam pengelolaan dan hubungan kekuasaan yang memengaruhi distribusi akses di tingkat lokal.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan air bersih di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, dipengaruhi oleh tidak hanya keterbatasan sumber daya alam, tetapi juga oleh dinamika politik lokal yang berdampak pada proses perencanaan dan implementasi program. Meskipun pemerintah desa memiliki wewenang resmi dalam pembangunan, terbatasnya kapasitas keuangan dan dukungan kelembagaan menyebabkan program air bersih tidak berjalan secara berkelanjutan. Hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan juga masih minim dan belum terkoordinasi dengan baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat sementara dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pemeliharaan yang memadai. Dari sudut pandang teori akses yang dikemukakan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses yang didasarkan pada hak formal tidak serta-merta menjamin kemampuan yang efektif dalam mengelola sumber daya air. Justru, mekanisme struktural dan hubungan sosial yang lebih berpengaruh terhadap pola akses masyarakat. Karena sistem pengelolaan resmi yang belum berfungsi secara maksimal, masyarakat mencari cara adaptif dengan menggunakan sumber air lain seperti air hujan dan air dari sungai. Ini menunjukkan bahwa masalah air bersih

di wilayah pesisir Banyuasin II bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan manajemen dan hubungan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya air.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, S., & Angela, D. (2023). Dinamika politik dalam gerakan masyarakat sipil menolak privatisasi pengelolaan air di Jakarta. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 457-467.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik keajahteraan rakyat Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistic-table/2/MzI0I0zI=/nilai-air-bersih-yang-disalurkan.html>
- Djana, M. (2023). ANALISIS KUALITAS AIR DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI KECAMATAN NATAR HAJIMENA LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Redoks*, 8(1), 81-87. <https://doi.org/10.31851/redoks.v8i1.11853>
- Hutauruk, A. (2023). *Peran pemerintah desa Muara Setia dalam penyediaan air bersih Kabupaten Aceh Tenggara*, Universitas Medan Area, Medan.
- IRA, S., SYARIFA, A., YONA, K. S., & SRI, H. (2023). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *TERANG: JURNAL KAJIAN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM Yupedumelu: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(1), 212-223.
- Kadarisman, M. (2021). Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2(1), 141-157. <https://doi.org/10.24853/kais.2.1.141-157>
- Mardeansyah, Y. D., & Ma'arief, M. S. (2022). Tinjauan Pengelolaan Sarana Air Bersih Desa Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang melalui Program PDAM. *STATIKA: Jurnal Teknik Sipil*, 8(1), 25-37.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153-181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Siregar, E. Z. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(1), 130-147.
- Umarella, B. (2019). Analisis anggaran sebagai upaya dalam perencanaan dan pengendalian biaya proyek pada PT X di Kota Ambon. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(2), 70-72.
- Puspa, S. (2024). Dinamika partai politik dalam merekrut calon legislative pada pemilu 2024 (Studi pada dewan pimpinan cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.